

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Konsep Strategi

2.1.1. Pengertian Strategi

Strategi adalah ilmu tentang teknik atau taktik, cara atau kiat muslihat untuk mencapai sesuatu yang diinginkan (Pena 2006, 448). Politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam wilayah tertentu (Surbakti 1992, 10). Jadi, strategi politik adalah ilmu tentang teknik, taktik, cara, kiat yang dikelola oleh politisi untuk mendapatkan dan mempertahankan sumber-sumber kekuasaan, merumuskan dan melaksanakan keputusan politik sesuai yang diinginkan.

Sun Tzu merumuskan strategi politik, dengan menyatakan bahwa, dalam pemilihan strategi harus ada hal-hal tertentu yang diprioritaskan: yang pertama adalah bentuk yang terbaik dalam memimpin perang adalah menyerang strategi lawan, yang terbaik kedua adalah menghancurkan aliansi lawan, yang terbaik berikutnya adalah menyerang tentara lawan, yang paling buruk adalah menduduki kota-kota dibenteng lawan (Schroder 2004, 5). Sun Tzu mengartikan strategi sebagai salah satu cara untuk dengan mudah menaklukkan lawan, kalau perlu tanpa pertempuran (*battle*) atau dengan kata lain strategi diperlukan kalau ada lawan. Menurut Schroder bahwa strategi politik merupakan strategi yang digunakan untuk mewujudkan cita-cita politik (Schroder 2004, 5).

Strategi politik adalah strategi yang digunakan untuk merealisasikan cita-cita politik. Contohnya adalah pemberlakuan peraturan baru, pembentukan suatu struktur baru dalam administrasi pemerintah atau dijalankannya program deregulasi, privatisasi atau desentralisasi (Scooder

2009, 5-6). Tanpa strategi politik atau proyek besar jangka panjang tidak akan dapat terwujud.

Dalam strategi politik sangat penting mengenal strategi komunikasi. Strategi komunikasi sangat penting sehingga membawa keuntungan yang jelas bagi seseorang, atau selama ini yang diabaikan lawan. Citra yang diinginkan (target image) antara lain: dalam proses implementasi, kelemahan pemerintah dan satuan eksekutif terutama sekali terletak dibidang kehumasan, terget image menetapkan landasan bagi pekerjaan kehumasan, dan semua tindakan kehumasan hanya bertujuan untuuk menyebarkan citra ini dn menanamkan dalam benak kelompok sasaran. Citra yang diinginkan terkait dengan pilihan tema, gaya, cara konforntasi dan tawaran sumber daya manusia (Adam, 4-8).

2.1.2. Perencanaan Konseptual Strategi politik

Sistematika 10 langkah stategi politik (Scooder 2009, 24-40):

a. Merumuskan misi

Perumusan menjabarkan hal apa saja yang perlu direncanakan secara strategi. Hal ini harus mencakup tiga elemen yakni tujuan secara keseluruhan yang menguraikan posisi yang ingin kita capai melalri perncanaan strategi tersebut, alasan pentingnya pencapaian tujuan secara keseluruhan dan kerangka waktu (kurun waktu) dimana keseluruhan tujuan harus tercapai.

Dalam sebuah strategi politik, misi dapat diartikan persetujuan atas suatu posisi tertentu, partisipasi dalam suatu tugas tertentu, dipilih sebagai kandidat. Dalam sebuah perencanaan karir politik, misi harus menyatakan untuk siapa strategi itu direncanakan. Dengan demikian misi dapat menetapkan suatu kerangka atau batasan.

Misi harus mengidentiifikasi jangka waktu, hingga kapan keseluruhan sasaran harus dicapai, dan misi tidak boleh dirumuskan secara terlalu optimis, sehingga menjadi tidak realitis.

b. Penilaian situasional dan evaluasi

Analisa situasional dan evaluasi membahas fakta-fakta yang dikumpulkan, yang dikelompokkan kedalam kekuatan dan kelemahan serta perkiraan kemungkinan keberhasilan yang terealisasi (Scooder 2009, 24-40).

1) Pengumpulan fakta

Pengumpulan fakta berarti pengumpulan fakta-fakta internal dan fakta eksternal yang relevan. Fakta internal adalah fakta yang menyangkut organisasi sendiri. Fakta eksternal adalah fakta yang menyangkut para pekerja atau lingkungan atau lingkungan dimana akan direalisasikan. Pembatasan fakta internal dan eksternal tidak terlalu mudah, tapi pembatasan dilakukan sebelum proses pengumpulan dimulai, untuk menghindari munculnya kesalah pahaman.

2) Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan

Fakta-fakta yang telah terkumpul, secara sistematis digolongkan dan ditimbang berdasarkan kadar relevansi, ukuran, kepentingan dan urgensi. Setiap fakta diteliti untuk menentukan apakah fakta-fakta mendukung atau justru mengganggu pelaksanaan. Apabila fakta ini mendukung, fakta ini akan menjadi kekuatan. Sebaliknya, apabila mengganggu pelaksanaan, ia akan menjadi kelemahan.

3) Analisa kekuatan dan kelemahan

Kekuatan dan kelemahan sudah diketahui, maka keduanya harus dievaluasi. Setelah mengelompokkan mereka berdasarkan kadar kepentingan, perlu untuk menetapkan apakah kita memiliki pengaruh terhadap kelemahan-kelemahan tersebut dalam arti dapat mengeliminir atau setidaknya mengurasinya. Dalam menganalisa dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan kita, yang dihadapkan dengan pesaing atau lawan dalam konteks perencanaan strategi politik dan mengamati lingkungan eksternal.

4) Umpan balik (*Feedback*)

Setelah menganalisa kekuatan dan kelemahan, langkah berikutnya adakah menentukan apakah dapat dicapai dalam kurun waktu yang telah ditetapkan. Apabila dianalisa kekuatan dan kelemahan menunjukkan bahwa ada keuntungan strategis yang jelas sehingga kemenangan pasti dapat diperoleh, dan kelemahan cukup dapat dilindungi, maka tersebut memiliki kemungkinan untuk dicapai.

c. Perumusan *sub*-strategi

Sementara langkah penelitian situasional lebih menyibukan diri dengan keadaan dan situasi masa lalu, fokus kita harus bergerak maju kedepan untuk perumusan *sub*-strategi. Langkah-langkahnya sebagai berikut menyusun tugas-tugas, merumuskan strategi dan mengevaluasi strategi. Apabila penilaian situasional sudah selesai, menjadi jelas sesuatu yang telah dirumuskan akan dijalankan atau masih perlu direvisi (Scooder 2009, 24-40).

1) Menyusun tugas-tugas

Berdasarkan analisa kekuatan dan kelemahan, lahirlah tugas-tugas yang harus diselesaikan. Tugas-tugas tersebut adalah meneliti kelemahan kita harus dieliminir, memberikan pertahanan dengan cara menutupi, mengalihkan perhatian yang harus dibangun, setelah itu menelaah kekuatan kita untuk menyerang lawan dan jika lawan menunjukkan kelemahan yang tidak terhubung dengan kekuatan kita, maka kita harus membangun kekuatan ini.

2) Merumuskan strategi

Pertama-tama harus memilih isu-isu yang diperhadapkan dengan pesaing atau lawan. Isu-isu ini hendaknya berupa isu atau argumen yang membawa keuntungan yang jelas. Lingkungan dimana sebuah isu dijalankan memainkan peranan yang penting dalam penentuan isu dan menguatkan kekuatan serta semua penyerangan hanya satu isu dalam akta tertentu.

3) Mengevaluasi strategi

Masing-masing strategi yang dipilih untuk penyelesaian tugas haruslah saling melengkapi. Mereka harus saling cocok, baik ditingkat *sub-sub* strategi maupun dalam strategi menyeluruh. Karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap strategi-strategi yang dipilih setelah strategi itu dirumuskan.

d. Perumusan sasaran

Setelah sasaran dirumuskan, tanggung jawab untuk memindahkan strategi ke unit-unit taktis, dan diimplementasikan melalui pembagian tugas. Strategi telah ditetapkan, maka pendekatan untuk memanfaatkan kekuatan terhadap kelemahan lawan dan untuk memecahkan kelemahan sendiri juga ditetapkan. Tujuan harus menggambarkan keadaan pada akhir sebuah proses dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ini harus dapat dicapai dan tidak boleh menjadi ilusi belaka. Tujuan sudah dirumuskan, masing-masing strategi harus direalisasikan dan dijalankan. Tujuan ini masing-masing harus dibagi ke dalam unit taktis yang bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan. Karena itu, kuantitas, kualitas, jangka waktu dan tanggung jawab harus ditetapkan setelah tujuan dirumuskan.

e. Target *image*

Strategi untuk kegiatan kehumasan atau *Public Relations* (PR) dirumuskan dan diimplementasikan di tingkat "PR", setelah keputusan mengenai "citra yang diinginkan" (*target image*) ditetapkan. *Arget image* melukiskan citra yang diharapkan, yang hendak dicapai setelah dijalankannya rangkaian pekerjaan kehumasan yang panjang dalam kelompok target target *image* ditentukan oleh keputusan strategi mengenai perumusan tugas dan pilihan-pilihan yang berkaitan dengan isu, gaya, jenis konfrontasi dan orang-orang yang diperhitungkan.

f. Kelompok-kelompok target

Kelompok target adalah kelompok-kelompok masyarakat atau organisasi mereka yang penting untuk pencapaian misi. Kelompok ini perlu didekati dalam waktu yang telah ditetapkan. Kelompok ini, diidentifikasi dengan menginterpretasikan keputusan strategis, khususnya tujuan taktis, dan melalui analisa citra yang diinginkan (*target image*). Apabila kelompok target telah didefinisikan, fondasi untuk implementasi strategi yang komunikatif ditetapkan. Fondasi ini dilengkapi dengan pesan kelompok target dan instrumen-instrumen kunci.

g. Pesan kelompok target

Kelompok target yang telah dibahas diatas membutuhkan informasi-informasi tertentu berdasarkan keputusan strategis yang telah diambil sebelumnya untuk memungkinkan bereaksi sesuai dengan apa yang telah direncanakan secara strategis. Informasi ini dapat dikomunikasikan secara khusus dengan masing-masing kelompok target tidak boleh saling bertentangan. Perluasan pesan kelompok target merupakan instrumen yang kerap digunakan pada tahap akhir masa kampanye, untuk memberikan janji tertentu kepada kelompok pemilih tertentu.

h. Instrumen-instrumen strategi

Pemilihan instrumen kunci terutama berkaitan dengan aksi-aksi dan alat komunikasi yang akan digunakan. Instrumen-instrumen dan aksi ini disesuaikan secara khusus bagi kelompok target. Untuk itu ada syarat bahwa kelompok yang dijadikan kelompok target telah dikenali terlebih dahulu, karena setiap kelompok target hanya diraih melalui pendekatan atau komunikasi tertentu. Pemilihan instrumen-instrumen kunci yang akan digunakan sekaligus menghasilkan keputusan-keputusan penting yang berhubungan dengan sumber data untuk mengimplementasikan strategi

serta efektivitas kampanye. Keputusan ini, beserta kelompok target yang dipilih menjadi prasyarat keberhasilan pelaksanaan strategi.

i. Implementasi strategi

Dalam mengimplementasikan strategi, faktor manusia dan faktor operasional perlu diperhitungkan. Sebelum implementasi strategi dilakukan terlebih dahulu perlu diambil keputusan mengenai tujuan taktis, perumusan citra yang diinginkan, identifikasi kelompok target, pesan kelompok target dan instrumen kunci. Setelah itu barulah peraturan untuk implementasi strategi perlu ditetapkan. Dalam mengimplementasikan strategi politik, faktor manusia menjadi signifikan untuk tiga aspek yaitu pimpinan politik, pimpinan partai yang bekerja penuh dan anggota partai yang bekerja penuh dan anggota partai yang bekerja paruh waktu atau sukarelawan. Hubungan antara ketiga pihak ini, kuantitas, kualitas, pendidikan, motivasi dan etika merupakan syarat awal bagi keberhasilan implementasi strategi. Sementara dalam bidang operasional, syarat awal untuk keberhasilannya tergantung pada prinsip-prinsip kecepatan, penyesuaian diri dan tipu daya.

j. Pengendalian strategi

Pengendalian strategi terdiri dari dua elemen yang menentukan keberhasilan penerapan atau strategi elemen yang pertama adalah prinsip pengumpulan data intlijen dan perolehan informasi dipihak sendiri. Selain itu dianalisis dengan menggunakan analisis *SWOT*, yakni *Strength*, *Weakness*, *Opportunities*, *Threats* yang berarti kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Sementara *SWOT* membatasi diri pada penilaian situasi dan perumusan strategi yang bergerak lebih jauh pada evaluasi strategi dan terutama pelaksanaannya (Scooder 2009, 11-13).

2.1.3. Jenis-jenis strategi

Politisi akan selalu dihadapkan pada berbagai kemungkinan kerjasama dengan pihak lain. Oleh karena itu, perlu mengenal sebelas

strategi utama yang diperkenalkan oleh *Peter Schroder* yaitu (Scooder 2009, 11-13):

a. Strategi *defect*

Strategi "*defect*" adalah menolak untuk bekerja sama dalam setiap langkah yang diambil. "*Defect*" merupakan sebuah strategi yang sangat sederhana, yang senantiasa menolak untuk bekerjasama secara buta namun sekaligus mengejar sasaran. Jelas terlihat bahwa "*defect*" tidak dapat dikalahkan. Tidak ada strategi lain yang apabila dibandingkan secara langsung dapat mengumpulkan lebih banyak poin dibandingkan "*defect*", karena lawan hanya dimungkinkan untuk memperoleh hasil bekeja sama atau tidak bekerja sama.

b. Strategi *cooperate*

Strategi "*cooperate*" adalah strategi yang menjelaskan bekerja sama dalam setiap langkah yang diambil. Strategi merupakan lawan dari strategi "*defect*" dan memiliki sifat-sifat yang berlawanan. "*Cooperate*" tidak dapat menang karena ia hanya bisa mencapai beberapa poin atau tidak dapat lebih banyak dari pada poin lawan. Apabila lawan mau kerja sama, maka strategi ini tidak akan merugikan, namun karena strategi buta ini, "*cooperate*" sangat mudah dimanfaatkan.

c. Strategi *random*

Strategi "*random*" adalah strategi yang posisinya ditegah-tengah menerima atau menolak. Contohnya: lemparlah uang logam, undilah kalau dapat sisi A berarti anda harus bekerja sama dan kalau dapat sisi B sebaliknya. "*Random*" memainkan "*defect*" atau "*cooperate*" dengan probabilitas yang sama. Tidak ada strategi yang bertujuan melakukan kerjasama secara permanen dapat berhasil dengan menggunakan langkah "*random*". Jadi, apabila strategi ini tidak dimainkan secara buta, ia tidak akan

mudah bekerjasama. Dengan demikian, adalah mustahil untuk mencapai secara konsisten.

d. Strategi *per kind*

Strategi "*per kind*" adalah strategi yang menggunakan bermainlah secara "*periodik*" (bekerja sama, bekerja sama, menolak bekerja sama). Strategi ini dimaksudkan untuk membuai lawan agar merasa aman, lalu anda menyerang, supaya anda tetap mampu mengendalikannya. Dengan harapan bahwa ia akan menerima penolakan untuk bekerja sama dalam hal yang terjadi saat itu, untuk kemudian mau diajak bekerjasama kembali.

e. Strategi *per nasty*

Strategi "*per nasty*" adalah bermainlah secara periodik (menolak bekerja sama, bekerja sama). sama seperti strategi "*per kind*", hanya polanya diubah. Strategi ini awalnya tidak menerima kerja sama dengan lawannya tetapi diakhirnya menerima kerjasama dengan pesaingannya.

f. Strategi *spite*

Strategi "*spite*" adalah bekerja sama dalam langkah yang pertama, kemudian sama selama lawan belum menolak bekerja sama, setelah itu senantiasa menolak bekerja sama. Ini adalah strategi pertama yang mempertimbangkan respon lawan.

g. Strategi *soft majority*

Adalah mainkan langkah yang paling sering digunakan oleh lawan, dan apabila langkah yang diambil serupa bekerjasamalah. Strategi ini menggunakan melihat dan mengambil strategi yang digunakan lawannya setelah itu digunakan dan ditambahi dengan strategi yang lebih baik untuk memenangkan. Strategi ini berusaha menghindari pemanfaatan yang terus menerus, dengan cara merespon tindakan lawan yang cenderung tidak mau bekerjasama, antara lain dengan terang-terangan menolak kerja sama.

langkah ini memiliki keuntungan dengan diteruskannya kerjasama dengan pihak lawan yang siap untuk bekerjasama. Tapi kerugiannya adalah bahwa kita cenderung mudah ditipu, misalnya melalui "*per nasty*".

h. Strategi *tit for tat*

Adalah bekerjasama dalam langkah yang pertama dan dalam setiap langkah berikutnya, mainkan langkah yang dipergunakan lawan terakhir kali. Strategi ini adalah salah satu yang mau bekerjasama tetapi bertahan dengan melawan usaha-usaha pemanfaatan yang dilakukan lawan. Pada saat yang sama, strategi ini tidak bersifat mendendam melainkan menjawab kesedihan bekerjasama kembali jika ada tawaran untuk bekerjasama lagi. "*Tit For Tat*" tidak dapat menang karena tidak pernah menolak kerjasama tanpa motivasi, dan dengan demikian tidak pernah berusaha mencapai poin yang unggul. Dipihak lain, strategi ini juga tidak dapat ketinggalan lebih dari poin yang unggul, karena ia hanya membiarkan dirinya dimanfaatkan satu kali saja.

i. Strategi *mistrust*

Adalah menolak bekerjasama dalam langkah yang pertama, kemudian mainkan sama halnya dengan strategi "*tit for tat*". "*Mistrust*" sama sekali tidak membiarkan dirinya dipergunakan, karena strategi ini sejak awal sudah menolak untuk bekerjasama. Oleh karena itu, bergantung pada inisiatif lawan untuk memulai sebuah kerjasama. Seterusnya sama dengan "*Tit For Tat*".

j. Strategi *prober*

Adalah mainkan tiga langkah awal (bekerjasama, bekerja sama, menolak bekerja sama), kemudian menolak bekerja sama dalam setiap langkah berikutnya, apabila lawan bekerja sama dalam langkah kedua dan ketiga. Disini strategi lawan akan diuji terlebih dahulu. jika strategi lawan membiarkan dirinya untuk dimanfaatkan, "*prober*" mengambil langkah lebih lanjut untuk menolak bekerjasama. Langkah ini akan mengarahkan pada suatu sikap dasar yang agresif, yang bagaimanapun akan berubah menjadi

sikap yang kooperatif. Apabila lawan tampil lebih cerdas (*Tit For Tat*), karena jika tidak, hanya poin sedikit saja yang dapat diperoleh.

k. Strategi *pavlov*

Adalah bekerja sama hanya dalam langkah pertama, setelah itu hanya apabila kedua pemain mengambil langkah yang sama. "*pavlov*" memiliki dasar pemikiran yang sama seperti "*Tit For Ta*", tetapi memiliki tuntutan yang lebih tinggi terhadap kesediaan diri sendiri untuk bekerja sama. Hanya jika kerjasama lebih lanjut. Ini berarti, jika ada upaya pemanfaatan yang dilakukan lawan, strategi akan beraksi dengan tidak mau bekerjasama, dan selanjutnya tidak akan melakukan upaya untuk kembali bekerjasama.

2.2. Konsep partai politik

2.2.1. Pengertian partai politik

Sebelum beranjak pada pengertian partai politik, maka perlu memahami maksud dari politik itu sendiri. Dari pemahaman yang beragam, maka peneliti melihat politik sebagai kegiatan mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. Hal-hwal yang menyangkut kekuasaan dalam masyarakat yakni sifat, hakikat, dasar, proses, ruang lingkup dan hasil-hasil kekuasaan (Surbakti, 5). Jadi ilmu politik disimpulkan sebagai yang memusatkan perhatian pada perjuangan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, melaksanakan kekuasaan, mempengaruhi pihak lain, ataupun menentang pelaksanaan kekuasaan. Pandangan fungsionalisme menyatakan bahwa politik merupakan kegiatan para elit politik dalam mempengaruhi pemerintah, membuat dan melaksanakan kebijakan umum (*who gets what, when and how*) diantara para ilmuwan yang menggunakan kacamata pandangan ini adalah *David Easton* dan *Harold Lasswell* (Surbakti, 4-6). Sehingga bisa disimpulkan bahwa politik itu bersifat mempelajari kekuasaan, beserta sifat dan tujuan dari gejala-gejala kekuasaan lain yang tidak resmi (elit politik dan lain-lain).

Sehingga bisa disimpulkan bahwa politik itu bersifat mempelajari kekuasaan, beserta sifat dan tujuan dari gejala-gejala kekuasaan lain yang tidak resmi (elit politik dan lain-lain) (Budiarjo 2000, 161). Kelompok ini mempunyai bertujuan untuk meraih kekuatan politik dan merebut kedudukan politik. Ada beberapa defenisi partai politik yang diberikan para ilmuwan politik. *Carl Friedrich* memberikan batasan partai politik sebagai kelompok manusia yang terorganisikan secara stabil dengan tujuan untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan bagi pemimpin partainya, dan berdasarkan kekuasaan itu akan memberikan kegunaan materil dan idil kepada para anggotanya (Surbakti, 116).

Roger H. Soltau seperti dikutip, mengatakan bahwa partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisasi, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka (Jurnal 2005, 641). Dalam bukunya *Ekonomik Et Societie Marx Weber* memberikan defenisi tentang parpol, menurutnya parpol adalah organisasi publik yang bertujuan untuk membawa pemimpinnya berkuasa dan memungkinkan para pendukungnya (politisi) untuk mendapatkan keuntungan dari dukungan tersebut (Firmansyah 2008, 66).

Menurut *Giovanni Sartori seperti dikutip*, partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan melalui pemilihan umum itu, mampu menempatkan calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan publik (Budiarjo 2000, 404-405). Pengertian yang lebih lengkap di kemukakan oleh *Marx N Hagoapian*, menurutnya partai politik adalah suatu organisasi yang di bentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijaksanaan publik dalam kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologi tertentu melalui praktik kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan (Yanto, 642).

Menurut *Gabriel A. Almond* parpol adalah organisasi manusia dimana didalamnya terdapat pembagian tugas dan petugas untuk mencapai suatu tujuan, mempunyai ideologi (*ideal objective*), mempunyai program politik platform, sebagai rencana pelaksanaan atau cara pencapaian tujuan secara lebih pragmatis menurut penahapan jangka dekat sampai jangka panjang serta mempunyai ciri berupa keinginan untuk berkuasa. Dengan demikian, setiap organisasi manusia yang memenuhi kriteria di atas secara material dan substansial dapat dianggap sebagai parpol (Farindita 2010, 16).

Berdasarkan uraian dan penjelasan teori di atas, maka dalam rencana penelitian ini akan menggunakan teori *Gabriel A. Almond* tentang partai politik. Dia menjelaskan bahwa parpol termasuk salah satu kelompok infrastruktur politik. Sebagai mana sesuai dengan objek penelitian peneliti.

2.2.2. Fungsi Partai Politik

a. Komunikasi Politik

Komunikasi politik adalah proses penyampaian informasi politik dari pemerintah kepada masyarakat dan sebaliknya dari masyarakat kepada pemerintah (Surbakti 1992, 119). Komunikasi dalam proses komunikasi politik memainkan peran sosial terutama dalam pembentukan opini publik dan biasanya komunikator adalah pemimpin dari organisasi atau partai politik tersebut. Selain itu, komunikasi politik juga disebut penggabungan kepentingan setelah pendapat dan aspirasi masyarakat ditampung lalu diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang lebih teratur setelah itu partai politik dirumuskannya menjadi sebuah usulan kebijakan. Kemudian tertuang dalam program partai yang diperjuangkan melalui parlemen kepada pemerintah agar dijadikan kebijakan umum (Budiarjo 2003, 405).

Contoh: misal dilingkungan sekolah, OSIS itu ibarat Parpol. Jika ada aspirasi ataupun masalah yang dituntut siswa, misalnya perbaikan fasilitas sekolah. Pada saat itu terjadi interaksi antara siswa dan OSIS membahas

mengenai kurangnya fasilitas sekolah. Selanjutnya OSIS menyampaikan aspirasi/tuntutan siswa tadi kepada pihak sekolah. Interaksi antara siswa(masyarakat), OSIS (parpol) dan pihak sekolah (pemerintah), merupakan suatu komunikasi. OSIS sebagai suatu sarana komunikasi antara pihak siswa dan pihak sekolah. Dalam kehidupan politik suatu negara contoh tadi dapat diibaratkan para siswa itu masyarakat, OSIS itu Parpol, dan pihak sekolah itu Pemerintah (Ardimovis 2012).

b. Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik merujuk pada proses dimana sikap-sikap dan pola-pola tingkah laku politik diperoleh atau dibentuk guna menyampaikan patokan-patokan politik dan keyakinan-keyakinan politik kepada generasi berikutnya(G.B. Powell Jr 1966, 92-94). Sosialisasi politik juga merupakan proses pembentukan sikap dan orientasi anggota masyarakat (Surbakti 1992, 122). Contoh: penyampaian program politik parpol pada acara kampanye menjelang pemilu. Hal tersebut merupakan salah satu fungsi papol sebagai sarana sarana sosialisasi politik (Ardimovis 2012).

c. Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang dalam partai politik. Partisipasi politik mencakup semua kegiatan sukarela melalui keikutsertaan seseorang dalam proses pemilihan pemimpin-pemimpin politik dan turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam pembentukan umum. Indikatornya adalah berupa kegiatan individu atau kelompok yang bertujuan ikut aktif dalam kegiatan politik, memilih pimpinan publik atau mempengaruhi kebijakan publik (Budiarjo 2003, 17-19).

d. Pendidikan Politik

Namun, terdapat salah satu fungsi partai politik menurut Sukarna yang dikutip dari Maurice Duverger bahwa partai juga berfungsi sebagai

sarana pendidikan politik kepada masyarakat (Duverger 1994, 24). Kemudian, fungsi partai politik juga dapat dikategorikan menjadi dua dalam wadah internal organisasi dan eksternal organisasi sangat penting dalam pembinaan, edukasi, pembekalan dan kaderisasi agar partai politik menjadi lebih kuat. Fungsi partai politik yang kedua yaitu eksternal organisasi, dimana organisasi ini berkontribusi bagi masyarakat, bangsa dan negara agar moral dan etika masyarakat terjaga lebih baik (Firmanzah 2008, 69).

2.2.3. Klasifikasi Partai Politik

Metode yang paling konservatif dalam mengklasifikasikan partai politik ialah menurut jumlah partai yang ada dalam suatu negara. Dengan cara konvensional tersebut dikenal adanya tiga klasifikasi partai politik, yaitu (Haricahyono 1991, 195-199):

- a. Sistem partai tunggal (*one party system*)
di dalam suatu negara hanya ada satu partai yang dominan di antara beberapa variasi tertentu. Sistem ini menunjukkan adanya satu partai yang dominan di antara beberapa partai politik kecil lainnya.
- b. Sistem dua partai (*two party system*)
Biasanya digunakan untuk menunjukkan adanya dua partai politik dalam suatu negara atau dengan beberapa variasi tertentu menunjukkan adanya beberapa partai politik tetapi terdapat dua partai yang berperan dominan.
- c. Sistem banyak partai (*multiparty system*)
Sistem ini menunjukkan adanya banyak partai politik dalam satu negara, tanpa memperhatikan jumlah partai politik yang mempunyai kedudukan dominan dalam pemerintahan.

2.2.4. Macam-Macam Partai

Partai politik juga telah terdiferensiasi berdasarkan tipologinya atau klasifikasi. Klasifikasi itu dapat diketahui dari tiga dasar kriteria, yaitu asas

dan orientasi, komposisi dan fungsi, serta basis tujuan dan sosial. Dari sisi asas dan orientasi, parpol dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu:

- a. Parpol pragmatis, yaitu suatu partai yang mempunyai program dan kegiatan yang tidak terikat kaku pada suatu doktrin dan ideologi tertentu.
- b. Parpol *doktriner*, ialah suatu parpol yang memiliki sejumlah program dan kegiatan konkret sebagai penjabaran ideologinya.
- c. Parpol kepentingan merupakan suatu parpol yang dibentuk dan dikelola atas dasar kepentingan tertentu, seperti petani, buruh, etnis, agama, yang secara langsung ingin berpartisipasi dalam pemerintahan.

2.2.5. Rekrutmen Politik

Dalam partai politik terdapat beberapa fungsi penting yang dijalankan partai sebagai sarana dalam mengaplikasikan tujuan mereka. Salah satu fungsi partai politik yang terkait dengan ini adalah rekrutmen partai politik (Amal 1996, 28). Rekrutmen merupakan suatu proses untuk mencari dan menyeleksi anggota untuk kegiatan regenerasi dari sebuah organisasi, baik partai politik, lembaga pemerintahan maupun organisasi lainnya. Namun, rekrutmen lebih dikenal dalam bahasa politik seperti yang terdapat dalam buku *Dasar-Dasar Ilmu Politik* yang menyebutkan: "...proses mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai..." (Budiarjo 2000, 164).

Istilah rekrutmen lebih dikenal dalam bahasa perpolitikan, dan kemudian diadopsi oleh partai politik seiring dengan kebutuhan partai akan dukungan kekuasaan dari rakyat, dengan cara mengajak dan turut serta dalam keanggotaan partai tersebut. Rekrutmen sendiri memiliki acuan waktu dalam prosesnya, maka pada saat itu pula rekrutmen dilakukan pada saat partai memerlukan. Pendapat lainnya yang mengemukakan pengertian rekrutmen politik oleh Ramlan Surbakti dalam buku *Memahami Ilmu Politik* yang dimaksud rekrutmen politik adalah:

“Seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya, dengan mengkhususkan kepada orang-orang yang mempunyai bakat yang cukup menonjol, partai politik menyeleksi dan menempatkannya sebagai seorang calon pemimpin” (Surbakti 1992, 118)

Rekrutmen politik partai dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan sebagai ajang untuk mencari dan menyeleksi keanggotaan baru untuk diikutsertakan dalam partai politik sebagai pembelajaran politik, disamping untuk melakukan regenerasi dalam partai politik tersebut maka dilakukan melalui mekanisme yang diterapkan oleh partai. Pengaruh rekrutmen politik sangat menentukan dalam regenerasi kehidupan partai. Hal itu dikarenakan partai memerlukan penyegaran keanggotaan untuk dapat bertahan dalam mempertahankan kekuasaan politiknya dimata masyarakat.